

## **BAB IV**

### **ANALISA PERBEDAAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DONALD TRUMP DAN BARRACK OBAMA TERHADAP ISIS DAN ALASANNYA**

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan alasan mengapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Donald Trump menjadi lebih bersifat represif dibandingkan dengan kebijakan luar negeri era Barrack Obama. Analisa akan dilakukan berdasarkan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dicanangkan oleh William D. Coplin yaitu dengan menimbang beberapa faktor yang akan mempengaruhi Presiden dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Analisa akan dilakukan dengan membandingkan tiga faktor utama berdasarkan teori pengambilan kebijakan luar negeri Coplin yaitu Faktor Politik Domestik, Kapabilitas Ekonomi dan Militer dan Konteks Internasional yang kemudian ketiga faktor tersebut akan dianalisa berdasarkan era kepemimpinan Barrack Obama dan Donald Trump yang kemudian menyebabkan terdapatnya perbedaan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Obama dan Trump terhadap ISIS.

#### **A. Politik Domestik**

Menurut Coplin ada 2 pihak yang sangat berperan dalam penentuan kebijakan luar negeri yang tentunya diputuskan berdasarkan kondisi politik dalam negeri suatu negara berjalan. Pengambil keputusan yang merupakan pemerintahan tertinggi suatu negara dalam memutuskan kebijakan dipengaruhi oleh suatu pihak yang disebut Coplin sebagai *politic influencer*. Pihak penguasa tentu mengincar suara-suara dukungan terhadap rezimnya dari pihak *politic influencer* seperti masyarakat dan partai-partai politik (Coplin W. D., 2003).

##### **1. Dinamika Politik Domestik era Presiden Barrack Obama**

Barrack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang diusung oleh Partai Demokrat yang mana Partai Demokrat adalah rival dari Partai Republik dalam pemilu Amerika Serikat. Tentu saja terdapat perbendaan pandangan atau orientasi antara Partai Demokrat dan Partai Republik dalam menanggapi isu-isu yang terjadi yang berasal dari

pandangan-pandangan politikusnya yang kemudian berdampak terhadap bagaimana Presiden dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.

Partai Demokrat merupakan partai yang memiliki orientasi terhadap perdamaian dan menjunjung tinggi hak kebebasan bersama. Partai Demokrat juga kemudian menjadikan orientasi tersebut sebagai cita-cita yang harus dicapai ketika Presiden Barrack Obama yang berasal dari Demokrat menang dan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Pandangan atau citra Amerika Serikat di Dunia Islam akhirnya menjadi fokus utama Barrack Obama ketika menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan Obama karena Obama juga memandang bahwa terorisme merupakan musuh bersama dan maka dari itu dibutuhkan persatuan Amerika Serikat, bahkan dunia untuk melawan terorisme.

Hal lain yang membuat Obama menanggapi bahwa persatuan dengan Dunia Islam adalah salah satu hal yang penting adalah karena pada era kepemimpinan Presiden George W. Bush, citra Amerika Serikat di Dunia Islam menjadi buruk. Diawali dengan tragedi serangan 9/11 di New York yang dilakukan oleh kelompok teroris Islam, Al-Qaeda, Bush langsung menerapkan kebijakan represif untuk melawan teroris tersebut. Namun kebijakan yang diambil George W. Bush kemudian juga menjadi kebijakan yang diskriminatif terhadap Islam yang kemudian hal ini menjadikan isu Islamophobia di Amerika Serikat sangat kuat. Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang anti-Islam dan bahkan masyarakat-masyarakat Amerika Serikat menganggap bahwa Islam adalah teroris dan Islam mengajarkan terorisme sehingga kehidupan masyarakat Muslim di Amerika Serikat menjadi terganggu bahkan dunia internasional pun memandang bahwa Amerika Serikat sangat anti-Islam.

Hal tersebut kemudian menjadikan orientasi Obama dan Partai Demokrat dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Ketika kampanye, Barrack Obama menjanjikan

untuk menghentikan perang dalam merespon keinginan masyarakat Amerika Serikat secara umum dan ketika terpilih menjadi Presiden, Obama menepati janjinya yang merespon aspirasi masyarakat Amerika Serikat yaitu untuk menghentikan perang yang kemudian menjadi orientasi Partai Demokrat dan Barack Obama dengan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Hampir 20.000 masyarakat Amerika Serikat berkumpul di berbagai kota seperti Los Angeles, Washington DC dan New York untuk memprotes perang yang terjadi di Timur Tengah karena masyarakat Amerika Serikat menginginkan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah dan menginginkan perdamaian (CBC News, 2007).

Tetapi dinamika yang terjadi di Afghanistan pada saat itu akhirnya memaksa Barack Obama untuk menurunkan kembali pasukan militer Amerika Serikat ke Afghanistan. Tetapi hal tersebut bukan ditujukan untuk perang melainkan untuk membantu Afghanistan dalam restorasi negaranya yaitu menentukan arah politik hingga menjaga stabilitas keamanan di Afghanistan agar tindakan terorisme tidak terjadi lagi disana.

Ketika ISIS mendeklarasikan kemunculannya pada tahun 2013, Obama pada awalnya memandang bahwa ISIS merupakan kelompok ekstremis biasa yang kemudian tidak terlalu diawasi oleh Obama. Namun seiring berjalannya waktu, ISIS menjelma menjadi organisasi teroris yang berbahaya dan mengancam kepentingan Amerika Serikat. Namun, Barack Obama bersama Partai Demokrat tetap menjunjung orientasinya yaitu untuk tetap melawan terorisme dengan mengajak masyarakat Amerika Serikat bersatu walaupun acap kali Barack Obama dan Partai Demokrat mendapat kritik dari pihak oposisi, yaitu Partai Republik dan para politikusnya yang mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Obama dalam menghadapi ISIS sangat lemah dan tidak tegas. Barack Obama juga menekankan bahwa untuk mengalahkan ISIS, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara masyarakat Islam dunia dengan Amerika Serikat. Bahkan Obama juga menekankan bahwa

persatuan antara masyarakat Amerika Serikat harus bersatu tanpa terkecuali, tanpa membedakan agama Islam dengan agama apapun karena terorisme merupakan musuh bersama yang harus diberantas bersama (The Economic Times, 2016).

Barrack Obama juga pada tahun 2014 membentuk suatu koalisi internasional yang terdiri dari 81 negara di dunia untuk memerangi ISIS. Hal ini dilakukan Obama lagi-lagi demi menyadarkan dan menekankan kepada masyarakat Amerika Serikat maupun masyarakat dunia bahwa ISIS merupakan musuh bersama dan dibutuhkan kekuatan bersama untuk mengalahkan dan menghilangkan pengaruh ISIS di dunia. Peran militer Amerika Serikat pada era kepemimpinan Barrack Obama dalam memerangi ISIS juga tidak semena-mena menyerang begitu saja. Akan tetapi militer Amerika Serikat difokuskan Obama untuk membantu dan melatih pasukan-pasukan lokal dan pasukan Koalisi Internasional dalam menghadapi ISIS sehingga citra Amerika Serikat di Dunia Islam akan lebih terjaga.

Kebijakan-kebijakan luar negeri terhadap ISIS tersebut diambil Barrack Obama dengan menimbang dinamika politik dalam negeri yaitu orientasi Partai Demokrat yang merupakan partai politik pengusung Barrack Obama dan juga keinginan masyarakat Amerika Serikat untuk tetap melawan terorisme dan ISIS tanpa merusak usaha-usaha Barrack Obama dalam memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam, tanpa mengganggu kehidupan rukun masyarakat Amerika Serikat yang beragama Islam dengan yang lainnya dan untuk tetap mencegah Islamophobia kembali muncul didalam dinamika kehidupan masyarakat Amerika Serikat.

## **2. Dinamika Politik Dalam Negeri era Donald Trump**

Donald Trump merupakan Presiden Amerika Serikat yang menjabat setelah Barrack Obama. Donald Trump berasal dari Partai Republik yang mana memiliki orientasi berbeda dengan Partai Demokrat dalam menanggapi isu-isu terorisme, termasuk untuk melawan ISIS. Pada era kepemimpinan George W. Bush, yang juga berasal dari

Partai Demokrat, Bush menekankan kebijakan yang keras terhadap Dunia Islam dengan dalih untuk melawan terorisme dan bahkan menganggap bahwa Islam bukan bagian dari Amerika Serikat sehingga munculah isu Islamophobia. Kemudian, ketika Obama menjadi presiden Amerika Serikat, isu Islamophobia perlahan menghilang karena kebijakan-kebijakan yang diambil Obama tidak bersifat keras dan diskriminatif terhadap Dunia Islam, bahkan Obama mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk bersatu melawan terorisme, bukan melawan Islam.

Tetapi, ketika Trump kemudian menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap Dunia Islam menjadi perlahan-lahan kembali muncul. Kebijakan-kebijakan diskriminatif Trump terhadap Islam dapat dilihat dari berbagai macam peraturan yang muncul yang dinilai merugikan masyarakat Islam seperti pelecehan yang dilakukan di kehidupan masyarakat sehari-hari di Amerika Serikat dan kebijakan untuk mempersulit urusan masyarakat Islam di bandara-bandara Amerika. Donald Trump bahkan juga melarang turis-turis dari beberapa negara di Timur Tengah yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk mengunjungi Amerika Serikat (Goodman, 2017).

Bahkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Pew Research Centre* bahwa mayoritas masyarakat Islam di Amerika Serikat merasa bahwa mereka sangat terdiskriminasi dibawah kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan sebelum Donald Trump terpilih, ketika kampanye pemilihan umum, mayoritas masyarakat Islam mendukung calon lain yang melawan Donald Trump, yaitu Hillary Clinton yang diusung oleh Partai Demokrat (BBC Indonesia, 2017).

Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diambil Donald Trump tersebut akhirnya pun turut memengaruhi pandangan masyarakat umum Amerika Serikat terhadap Islam. Masyarakat Amerika Serikat bahkan menganggap kebijakan diskriminatif terhadap warga yang beragama Islam tersebut justru perlu diterapkan untuk menekan jumlah

terorisme dan ekstremisme yang mengancam stabilitas keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat (BBC Indonesia, 2017).

Pada masa kampanye kepresidenan Donald Trump sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump telah mempromosikan kebijakannya untuk melawan ISIS. Bahkan Donald Trump sempat mengatakan bahwa cara terbaik untuk melawan ISIS adalah dengan menjatuhkan bom di wilayah-wilayah kekuasaan ISIS. Politikus-politikus Partai Republik lainnya pun mendukung cara-cara ofensif dengan mengesampingkan pandangan Islam terhadap Amerika Serikat (Henderson, 2015).

Kebijakan-kebijakan tersebut juga akhirnya tercerminkan terhadap bagaimana kebijakan Donald Trump dalam memerangi ISIS di Timur Tengah. Donald Trump secara agresif langsung menerapkan kebijakan ofensif untuk memerangi ISIS di Timur Tengah. Serangan demi serangan dilakukan pasukan militer Amerika Serikat atas perintah Donald Trump sehingga kemudian dapat memerangi ISIS dengan ofensif. Tetapi akibat serangan-serangan yang sangat ofensif tersebut akhirnya juga turut membunuh masyarakat-masyarakat sipil bahkan wanita dan anak-anak di Timur Tengah, karena memang Partai Republik bahkan masyarakat Amerika Serikat saat itu memandang bahwa Islam adalah ISIS dan ISIS adalah terorisme yang harus diberantas secara keseluruhan (Borger, Civilian deaths from US-led strikes on Isis surge under Trump administration, 2017).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Donald Trump tersebut dan juga bagaimana masyarakat Amerika Serikat merespon kebijakan tersebut kemudian menunjukkan bahwa memang orientasi Partai Republik dalam merespon terorisme adalah dengan memerangi Islam secara tidak langsung dan juga tetap menganggap bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dan mempraktekan aksi terorisme sehingga kemudian dianggap sebagai musuh bagi Amerika Serikat yang akan mengancam stabilitas keamanan dan kepentingan Amerika Serikat karena memang terbukti ada kesamaan pandangan terhadap Islam pada era kepemimpinan George

W. Bush dan pada era kepemimpinan Donald Trump yang sama-sama berasal dari Partai Republik.

### **3. Perbandingan Dinamika Politik Dalam Negeri di Amerika Serikat Era Barrack Obama dan Donald Trump**

Dinamika politik luar negeri di Amerika Serikat yang dapat memengaruhi para pengambil kebijakan dapat ditentukan dari bagaimana orientasi partai politik yang mengusung presiden tersebut dan bagaimana dinamika masyarakat Amerika Serikat dalam memengaruhi presiden untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Pada kasus ini terdapat perbedaan orientasi yang sangat mencolok antara dua partai politik utama di Amerika Serikat yaitu Partai Demokrat yang mengusung Presiden Barrack Obama dan Partai Republik yang mengusung Presiden Donald Trump.

Partai Demokrat dapat dikatakan merupakan partai politik yang orientasinya lebih liberal dibanding Partai Republik. Partai Demokrat melihat isu Islamophobia yang timbul pada era kepemimpinan George W. Bush yang berasal dari Partai Republik sebagai sebuah hambatan dalam mengatasi isu terorisme karena persatuan Amerika sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Presiden Barrack Obama yang berasal dari Partai Demokrat menentukan kebijakan luar negerinya terhadap ISIS. Cara-cara yang dinilai lebih menekankan kepada *soft diplomacy*, mengajak umat Islam untuk bersatu turut berjuang melawan ISIS dan menekankan bahwa Amerika Serikat merupakan kesatuan dalam memerangi ISIS sehingga usaha-usaha untuk merangkul kembali masyarakat Islam di Amerika Serikat sangat digencarkan oleh Obama.

Sementara Partai Republik merupakan partai politik yang memiliki pandangan dan orientasi yang sangat berbeda dengan Partai Demokrat dalam menanggapi isu terorisme dan ISIS. Partai Republik dapat dikatakan sebagai partai politik yang lebih bersifat konservatif dibandingkan Partai Demokrat. Partai Republik menganggap bahwa terorisme dan ISIS merupakan ancaman yang sangat bahaya bagi

Amerika Serikat. Sehingga tentu saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden yang berasal dari Partai Republik akan berbeda dengan kebijakan presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana setelah kepemimpinan Barrack Obama berakhir yang kemudian diteruskan oleh Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik yang dalam mengambil kebijakannya di dalam negeri yang sangat mendiskriminasi masyarakat Islam Amerika Serikat bahkan masyarakat Islam Dunia. Kebijakan-kebijakan diskriminatif Donald Trump tersebut pun akhirnya bisa mempengaruhi perspektif masyarakat Amerika Serikat bahwa memang kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam dapat menekan jumlah terorisme dan ekstremisme di Amerika Serikat sehingga kebijakan tersebut memang diperlukan.

Pandangan Partai Republik yang konservatif yang kemudian memengaruhi kebijakan-kebijakan Donald Trump bahkan memengaruhi pandangan masyarakat Amerika Serikat dalam mengatasi terorisme kemudian membawa Islamophobia kembali ke Amerika Serikat. Padahal sebelumnya, Islamophobia bisa jauh menurun di Amerika Serikat pada era kepemimpinan Barrack Obama yang berasal dari Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh orientasi partai – partai politik yang mengusung presiden dapat dipengaruhi dan mempengaruhi pandangan masyarakat umum Amerika Serikat dan kemudian mengarahkan presiden-presiden Amerika Serikat dalam menentukan arah dan sifat kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS.

## **B. Kapabilitas Ekonomi dan Militer**

Kapabilitas suatu negara dalam bidang ekonomi dan militer menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, dalam arti semakin kuat perekonomian dan militer suatu negara dapat semakin kuat juga negara tersebut dalam mempertahankan kepentingannya di negara lain melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat (Coplin W. D., 2003).



Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia (Statistic Times, 2018) dan begitu juga dalam bidang militernya, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terkuat di dunia (Global Fire Power, 2019). Hal tersebut menyebabkan konsumsi minyak Amerika Serikat mencapai angka yang tinggi dan Timur Tengah merupakan wilayah dengan jumlah minyak yang melimpah sehingga Amerika Serikat memfokuskan kepentingannya di Timur Tengah.

Sementara kekuatan ekonomi Amerika Serikat selalu bersifat fluktuatif. Pada awal masa Barrack Obama menjabat sebagai Presiden, Amerika Serikat sedang dilanda krisis ekonomi besar pada tahun 2008 sehingga perlu dilakukannya penghematan anggaran, dan salah satu anggaran yang dipotong jumlahnya adalah anggaran militer Amerika Serikat. Sementara pada era kepresidenan Donald Trump, ekonomi Amerika Serikat meningkat dengan baik. Tingkat pengangguran berkurang, meningkatnya pekerjaan di bidang manufaktur dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,2 % sehingga anggaran terhadap militer pun kembali ditingkatkan dan Trump juga menyudahi kebijakan penghematan anggaran militer yang ditetapkan oleh Obama.

### **1. Kapabilitas Ekonomi dan Militer Era Barrack Obama**

Pada tahun 2008, Amerika Serikat dilanda krisis ekonomi yang besar. Krisis ekonomi tersebut pun tentu saja memengaruhi bagaimana Barrack Obama dalam menentukan arah politik luar negerinya. Salah satu penyebab krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 adalah anggaran militer yang diperuntukan perang Irak dan perang Afghanistan sangat besar. Barrack Obama kemudian memutuskan untuk membuat strategi baru untuk mengatasi krisis tersebut dengan cara memperkecil anggaran yang dikeluarkan untuk militer. Jumlah dana pertahanan AS saat itu adalah 635 juta Dolar Amerika sementara anggaran militer Amerika Serikat sebelumnya adalah berjumlah 662 juta Dolar Amerika. Hal ini berarti terdapat pemotongan anggaran sebesar 13 juta Dolar Amerika. Obama juga

memotong anggaran perang Irak dan Afghanistan sebanyak 160 Miliar Dolar Amerika (Altman, 2017).

Kebijakan Obama untuk memotong anggaran militer ini kemudian menimbulkan perpecahan di dalam internal pemerintahan. Para pendukung Obama menilai bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang menandakan dirinya layak memenangkan Nobel Perdamaian, karena penghematan militer menandakan kegiatan militer, termasuk kegiatan militer di Timur Tengah akan diminimalisir. Sehingga banyak pasukan militer di Timur Tengah ditarik kembali ke Amerika Serikat dan menyudahi perang yang terjadi disana. Sementara para pihak oposisi yang berasal dari Partai Republik menilai bahwa keputusan Obama untuk menghemat anggaran militer tersebut sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Amerika dan hanya sebagai upaya untuk mencari empati politik dari masyarakat dan memberi ruang untuk terorisme kembali bangkit di Amerika Serikat (Altman, 2017).

Penghematan anggaran militer yang dilakukan Obama bukan semena-mena akan melemahkan kekuatan militer Amerika Serikat. Melainkan Obama memiliki strategi lain untuk tetap menjaga kapabilitas militer Amerika Serikat dan mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah yaitu dengan cara membangun koalisi internasional yang dibentuk Obama dengan tujuan mengalahkan ISIS. Untuk menggantikan operasi besar-besaran yang dilakukan militer Amerika Serikat yang menghabiskan banyak anggaran, Obama lebih sering menggunakan *drone* yang lebih hemat anggaran untuk melakukan operasi militer di Timur Tengah (Altman, 2017).

## **2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer Era Donald Trump**

Kondisi perekonomian Amerika Serikat pada era awal Donald Trump bisa dikatakan sangat berbeda dengan kondisi perekonomian saat Barrack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Donald Trump sebelum menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan seorang pebisnis kelas atas sehingga hal tersebut dapat dikatakan

sebagai salah satu faktor mengapa perekonomian Amerika Serikat meleset jauh.

PDB Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Donald Trump naik sebesar 2,2 % per tahunnya. Lebih besar dibandingkan PDB pada masa kepemimpinan Barrack Obama yang hanya naik sekitar 1,6 %. Angka pengangguran di Amerika Serikat pada kepemimpinan Donald Trump juga menurun. Bahkan pada bulan September dan Oktober 2018 angka pengangguran di Amerika Serikat mencapai angka 3,7 % yang mana angka tersebut adalah angka terendah sepanjang sejarah Amerika Serikat (Syafina, 2018).

Kondisi perekonomian Amerika yang baik pun tentu saja turut andil dalam membantu Donald Trump untuk menyusun anggarannya. Donald Trump langsung menembak angka yang sangat besar dalam anggaran militer yang diusulkannya. Donald Trump menganggarkan dana sejumlah 639 Miliar Dolar Amerika untuk anggaran militernya. Anggaran tersebut dirancang untuk mendanai pengeluaran utama militer seperti untuk membayar gaji dan fasilitas kesehatan pasukan militer, membeli alat-alat utama sistem pertahanan, dan untuk membiayai operasi-operasi militer.

Sebelumnya, Donald Trump telah menyatakan bahwa dirinya memang berniat membangun kekuatan militer lebih tinggi lagi dan menjadikan ISIS sebagai prioritas utama dalam militernya. Trump juga sebelumnya telah mengakhiri pembatasan anggaran yang sebelumnya ditetapkan oleh Obama. Donald Trump juga berambisi agar kekuatan militer Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan militer terkuat di dunia (Kompas.com, 2017).

Hal tersebut dapat dilihat ketika Donald Trump menurunkan hampir 200.000 pasukan militer Amerika Serikat di Timur Tengah untuk memerangi ISIS. Keseriusan dan keagresifitasan Donald Trump dalam memerangi ISIS juga dapat dilihat ketika Donald Trump memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat beserta dengan pasukan Koalisi Internasional untuk terus menggempur dan menyerang ISIS secara terus-terusan. Serangan udara maupun serangan darat menjadi andalan pasukan militer

Amerika Serikat dalam menyerang ISIS. Bahkan Donald Trump juga menyerang ISIS di wilayah Timur Tengah dengan bom MOAB yang diklaim sebagai bom dengan teknologi tercanggih yang dimiliki Amerika Serikat (Saputra, 2019).

### **3. Perbandingan Kapabilitas Ekonomi dan Militer pada Era Barrack Obama dan Donald Trump**

Kondisi perekonomian Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barrack Obama dan Donald Trump sangat berbeda, Dimana kondisi perekonomian yang tersebut akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana Barrack Obama dan Donald Trump dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Jika Obama harus menghadapi sebuah situasi yang sulit yaitu adanya krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 pada awal masa pemerintahannya, Donald Trump justru menghadapi situasi per ekonomian yang baik pada masa pemerintahannya.

Kondisi krisis ekonomi tahun 2008 yang dihadapi Barrack Obama membuat dirinya harus memutar otak agar krisis tersebut dapat diatasi. Karena salah satu penyebab krisis ekonomi tersebut adalah borosnya anggaran yang dirancang oleh George W. Bush untuk terlibat dalam Perang Irak dan Perang Afghanistan, Barrack Obama akhirnya memutuskan untuk memotong anggaran militernya, terutama anggaran untuk Perang Irak dan Perang Afghanistan. Barrack Obama juga menetapkan strategi militer yang dapat menghemat anggaran militernya untuk memerangi ISIS yaitu dengan memanfaatkan koalisi internasional dan membeli alat-alat yang canggih daripada untuk membiayai operasi-operasi militer yang besar agar kapabilitas militer Amerika Serikat tetap kuat. Sementara Donald Trump menikmati situasi yang justru mendukung keinginan dirinya untuk memerangi ISIS secara agresif. Kondisi perekonomian yang melesit baik membuat Trump lebih berani untuk menganggarkan dana yang besar untuk anggaran militernya.

## **C. Konteks Internasional**

Konteks Internasional menjelaskan bagaimana posisi suatu negara terhadap negara lain, konteks internasional juga menjelaskan sikap suatu negara terhadap negara lain dan menurut Coplin ada tiga hal yang mempengaruhi bagaimana konteks internasional dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yaitu geografis, politis dan ekonomis (Coplin W. D., 2003).

Secara keseluruhan, kepentingan dan posisi Amerika Serikat terhadap Timur Tengah tetap sama baik pada era pemerintahan Barrack Obama maupun Donald Trump baik dari segi geografis dan ekonomis. Tujuan dan cita-cita Amerika Serikat tetap sama hanya saja cara mendapatkan tujuan dan cita-cita tersebut yang berbeda.

### **1. Geografis dan Ekonomis**

Dari segi geografis dan ekonomis dapat kita perhatikan bahwa Amerika Serikat membutuhkan jumlah minyak dalam jumlah besar dan Timur Tengah merupakan wilayah dengan jumlah cadangan minyak yang besar sehingga Amerika Serikat perlu melakukan eksplorasi minyak di Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhannya.

Seiring berkembangnya zaman, tingkat kebutuhan Amerika Serikat akan minyak pun makin tinggi. Setiap tahunnya kebutuhan Amerika Serikat akan minyak selalu meningkat dengan drastis sehingga kegiatan eksplorasi Amerika Serikat yang dioperasikan di Timur Tengah untuk mencari minyak semakin besar. Jumlah penduduk yang selalu meningkat juga menjadi faktor akan kebutuhan minyak untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat seperti penggunaan bahan bakar bermotor, kebutuhan minyak rumah tangga hingga kebutuhan minyak untuk keperluan industri karena Amerika Serikat juga merupakan negara maju yang memiliki banyak industri besar didalamnya.

Alasan-alasan tersebut menyebabkan Amerika Serikat memfokuskan politik luar negerinya di Timur Tengah, terutama terhadap Irak karena Irak merupakan negara di

Timur Tengah dengan jumlah produksi minyak yang tinggi. Wilayah Irak yang rawan konflik dapat mempengaruhi stabilitas produksi minyak di Irak. Munculnya ISIS yang menjadikan Irak sebagai *basecamp* utama di Irak juga akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa Amerika Serikat ingin mengalahkan ISIS. Tujuan utama ISIS adalah untuk membentuk Negara Islam di dunia, apabila Irak berhasil dikuasai ISIS maka tentu akan merugikan Amerika Serikat karena pasokan minyak dari Irak akan terhenti jika ISIS berhasil menguasai kilang minyak di Irak.

## 2. Politis

Dalam segi politis, misi utama Amerika Serikat di Timur Tengah adalah untuk menanamkan ideologi demokrasi dan liberal yang telah dimulai sejak penggulingan rezim Saddam Husein pada tahun 2003. Adanya kelompok-kelompok ekstremis Islam yang menganut ideologi Islam Fundamentalis tentu akan menghambat upaya Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah.

ISIS merupakan sebuah ancaman yang besar bagi Amerika Serikat karena cita-cita yang digadangkan oleh ISIS adalah membentuk negara Islam yang menganut ideologi Khilafah, yaitu sistem pemerintahan Islam yang fundamental dimana Abu Bakar Al-Baghdadi, mantan pemimpin ISIS yang telah tewas pada era kepemimpinan Donald Trump, digadang-gadang sebagai calon pemimpin atau *khalifah* dalam negara Islam yang akan dibentuk ISIS (Blanchard & Humud, 2018).

Oleh karena itu, Barrack Obama maupun Donald Trump membuat kebijakan untuk melawan ISIS karena mengalahkan dan menghilangkan pengaruh ISIS di dunia akan mempermudah Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya lebih besar di Timur Tengah dan Amerika Serikat juga akan dianggap sebagai negara yang akan membawa perubahan dan kedamaian di dunia.

Amerika Serikat juga kemudian mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama memerangi ISIS. Terhitung sejak tahun 2014, Barrack Obama membentuk

suatu koalisi internasional yang kemudian dipimpin oleh Amerika Serikat sendiri untuk bersama-sama memerangi ISIS yang kemudian hingga pada masa kepemimpinan Donald Trump koalisi tersebut tetap berjalan. Koalisi Internasional Anti-ISIS juga dibentuk dengan mengajak negara-negara di Timur Tengah untuk dirangkul agar penanaman pengaruh di Timur Tengah akan terus berjalan sementara ISIS bersama-sama diperangi oleh koalisi internasional Anti-ISIS (Deutsche Welle, 2014).

**Tabel 4. 1 Perbedaan Dinamika Faktor-Faktor Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

No.	Era Aspek	Barrack Obama	Donald Trump
1.	Politik Domestik	Orientasi Partai Demokrat yang merespon keinginan masyarakat AS untuk menghentikan perang dan memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam sehingga dalam memerangi ISIS lebih mengandalkan sekutu-sekutu AS.	Orientasi Partai Republik yang ingin mengalahkan ISIS dengan tetap menggunakan kekuatan militer AS.
2.	Konteks Internasional	-Geografis & Ekonomis : AS perlu minyak dari Timur Tengah. -Politis : AS tidak ingin menghambat proses demokratisasi di Timur Tengah	- Geografis & Ekonomis : AS perlu minyak dari Timur Tengah. - Politis : AS tidak ingin menghambat

			proses demokratisasi di Timur Tengah
3.	Kekuatan Militer dan Ekonomi	Memiliki kekuatan Militer yang kuat tetapi karena terjadi Krisis Ekonomi tahun 2008, Obama menghemat anggaran militer.	Memiliki kekuatan militer yang kuat dan perekonomian pada era Trump meningkat baik dan mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk militer.